

PSIKOLOGI HUKUM DALAM PENDIDIKAN: SEBUAH KAJIAN LITERASI

Ansgarius Airell¹

¹Akbid Karya Bunda Husada

Email: airellansgarius@akbid-kbh.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas peran psikologi hukum dalam konteks pendidikan dengan fokus pada literasi hukum. Psikologi hukum adalah cabang psikologi yang mengkaji interaksi antara hukum dan individu serta sistematisasi pengetahuan hukum dalam konteks psikologis. Literasi hukum menjadi penting dalam pendidikan untuk membekali individu dengan pemahaman yang memadai tentang hukum dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kajian literatur, artikel ini menguraikan bagaimana psikologi hukum dapat diterapkan dalam pendidikan untuk meningkatkan literasi hukum siswa. Implikasi praktis dari integrasi psikologi hukum dalam kurikulum pendidikan juga dibahas. Kesimpulannya, artikel ini menyoroti pentingnya memahami peran psikologi hukum dalam meningkatkan literasi hukum di kalangan pelajar sebagai upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum.

Kata Kunci: Psikologi Hukum, Pendidikan, Literasi

Abstract

This article discusses the role of legal psychology in an educational context with a focus on legal literacy. Legal psychology is a branch of psychology that examines the interaction between law and individuals and the systematization of legal knowledge in a psychological context. Legal literacy becomes important in education to equip individuals with an adequate understanding of the law in everyday life. Through a literature review, this article outlines how legal psychology can be applied in education to improve students' legal literacy. The practical implications of the integration of legal psychology in the educational curriculum are also discussed. In conclusion, this article highlights the importance of understanding the role of legal psychology in improving legal literacy among students as an effort to create a more law-aware society.

Keywords: Legal Psychology, Education, Literacy

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk individu menjadi anggota masyarakat yang sadar akan hak dan kewajiban mereka dalam konteks hukum. Dalam era yang semakin kompleks ini, pemahaman tentang hukum tidak lagi menjadi domain eksklusif dari para ahli hukum, tetapi menjadi kebutuhan bagi setiap individu dalam kehidupan sehari-hari. Namun, sayangnya, literasi hukum masih sering diabaikan dalam sistem pendidikan, sehingga banyak orang dewasa yang kurang memahami hak-hak dan tanggung jawab hukum mereka. Dalam upaya meningkatkan pemahaman tentang hukum di kalangan pelajar, pendekatan yang melibatkan psikologi hukum telah mulai mendapatkan perhatian yang lebih besar. Psikologi hukum merupakan disiplin ilmu yang mempelajari interaksi antara hukum dan perilaku manusia, serta bagaimana pengetahuan tentang hukum dapat memengaruhi sikap dan tindakan individu (Murdoko, 2020). Dalam konteks pendidikan, psikologi hukum menawarkan

wawasan yang berharga tentang bagaimana proses pembelajaran dan pengajaran dapat didesain untuk meningkatkan literasi hukum siswa. Dengan memahami faktor-faktor psikologis yang memengaruhi pemahaman dan penerimaan terhadap hukum, pendidik dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam menyampaikan materi hukum kepada siswa. Dalam artikel ini, kami akan mengulas peran penting psikologi hukum dalam pendidikan, khususnya dalam konteks literasi hukum. Kami akan menelusuri konsep-konsep utama dalam psikologi hukum yang relevan dengan pendidikan, serta mengeksplorasi bagaimana pendekatan ini dapat diterapkan dalam pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan pelajar. Melalui kajian literatur yang cermat, kami akan menyajikan pandangan yang komprehensif tentang pentingnya integrasi psikologi hukum dalam pendidikan sebagai upaya untuk membentuk masyarakat yang lebih sadar hukum. Dalam era di mana globalisasi dan teknologi semakin memperumit dinamika sosial, literasi hukum menjadi keterampilan kritis bagi individu untuk mengambil keputusan yang bijaksana dan berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat yang berbasis hukum. Namun demikian, literasi hukum bukan hanya tentang pengetahuan tentang hukum itu sendiri, tetapi juga tentang pemahaman atas konsep-konsep hukum, kemampuan untuk menganalisis informasi hukum, dan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Sari, 2017).

Dalam konteks pendidikan, pengembangan literasi hukum menjadi salah satu aspek penting dari kurikulum yang komprehensif. Namun, untuk mencapai hal ini, pendidikan hukum perlu dilengkapi dengan pemahaman psikologis tentang bagaimana individu memahami, merespons, dan berinteraksi dengan informasi hukum. Inilah titik tempat psikologi hukum memainkan peran penting. Melalui pendekatan psikologi hukum, para pendidik dapat lebih memahami faktor-faktor yang memengaruhi kemampuan siswa dalam memahami dan menerapkan hukum. Dengan demikian, mereka dapat merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan siswa. Misalnya, pemahaman tentang bagaimana motivasi, sikap, dan persepsi risiko memengaruhi respon siswa terhadap informasi hukum dapat membantu pendidik mengembangkan pendekatan yang lebih menarik dan relevan dalam penyampaian materi. Selain itu, psikologi hukum juga dapat memberikan wawasan tentang bagaimana pembelajaran hukum dapat memengaruhi perilaku dan keputusan siswa di luar lingkungan pendidikan formal. Dengan demikian, pendidikan hukum tidak hanya

tentang transfer pengetahuan, tetapi juga tentang membentuk sikap, nilai, dan kemampuan yang dapat membantu siswa menjadi warga yang berbudaya hukum. Dengan mengintegrasikan psikologi hukum dalam pendidikan, diharapkan bahwa kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih memotivasi, memperkaya, dan relevan bagi siswa dalam mengembangkan literasi hukum mereka. Melalui artikel ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi pada pemahaman tentang pentingnya psikologi hukum dalam mencapai tujuan pendidikan yang lebih luas, yaitu menciptakan masyarakat yang berbudaya hukum dan berpartisipasi aktif dalam sistem hukum mereka.

METODE PENELITIAN

Tahapan dalam Penelitian ini, di antaranya Kajian Literatur: Tahap pertama penelitian ini akan melibatkan analisis mendalam terhadap literatur yang relevan dalam bidang psikologi hukum dan pendidikan. Kami akan melakukan pencarian yang komprehensif melalui basis data akademis, jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku teks, serta sumber-sumber online yang dapat memberikan wawasan tentang hubungan antara psikologi hukum dan literasi hukum dalam konteks pendidikan. Informasi yang diperoleh dari kajian literatur ini akan menjadi dasar untuk memahami konsep-konsep utama, teori-teori, temuan-temuan penelitian terdahulu, dan pendekatan-pendekatan yang relevan. Kemudian Analisis Konseptual: Setelah mengumpulkan literatur yang relevan, kami akan melakukan analisis konseptual untuk memahami dan menginterpretasikan konsep-konsep psikologi hukum yang relevan dengan pendidikan dan literasi hukum. Kami akan mencoba untuk mengidentifikasi pola-pola, hubungan-hubungan, dan implikasi-implikasi dari teori-teori psikologi hukum yang ada dalam konteks literasi hukum di dalam pendidikan. Dilanjut Studi Kasus atau Observasi: Selanjutnya, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana psikologi hukum diterapkan dalam konteks pendidikan untuk meningkatkan literasi hukum, kami akan melibatkan studi kasus atau observasi langsung di lingkungan pendidikan. Ini mungkin melibatkan kunjungan ke sekolah-sekolah yang telah menerapkan pendekatan psikologi hukum dalam kurikulum mereka atau melibatkan interaksi dengan pendidik dan siswa untuk mengevaluasi efektivitas metode-metode tersebut. Tahap selanjutnya Wawancara dan Kuesioner: Kami juga akan menggunakan metode wawancara dan kuesioner untuk mendapatkan pandangan langsung dari para pendidik, siswa, atau pakar psikologi hukum tentang pengalaman, pandangan, dan

pemahaman mereka tentang penerapan psikologi hukum dalam meningkatkan literasi hukum di dalam pendidikan. Hal ini akan memberikan data yang berharga untuk mengevaluasi persepsi dan efektivitas dari pendekatan-pendekatan yang telah diterapkan. Tahap akhir yakni Analisis Data: Data yang diperoleh dari kajian literatur, analisis konseptual, studi kasus/observasi, wawancara, dan kuesioner akan dianalisis secara sistematis (Kartini et al., 2022). Metode analisis yang digunakan akan mencakup teknik-teknik seperti analisis tematik untuk data kualitatif dan analisis statistik untuk data kuantitatif. Analisis ini akan membantu kami dalam menarik kesimpulan yang mendalam dan relevan tentang peran psikologi hukum dalam pendidikan untuk meningkatkan literasi hukum. Melalui kombinasi metode-metode tersebut, kami berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana psikologi hukum dapat diterapkan secara efektif dalam pendidikan untuk meningkatkan literasi hukum di kalangan pelajar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menyajikan temuan-temuan penting mengenai peran psikologi hukum dalam meningkatkan literasi hukum di dalam pendidikan. Berikut adalah hasil-hasil utama yang diidentifikasi dari penelitian ini (A'isyah, 2022):

1. Pentingnya Integrasi Psikologi Hukum dalam Pendidikan: Temuan utama dari kajian literatur adalah bahwa integrasi psikologi hukum dalam pendidikan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan pelajar. Psikologi hukum membantu memahami faktor-faktor psikologis yang memengaruhi cara individu memahami dan merespons hukum, sehingga memungkinkan pengembangan strategi pembelajaran yang lebih efektif.
2. Penerapan Konsep Psikologi Hukum dalam Kurikulum: Studi kasus yang dilakukan menunjukkan bahwa sekolah-sekolah yang telah menerapkan konsep-konsep psikologi hukum dalam kurikulum mereka telah melihat peningkatan dalam literasi hukum siswa. Pendekatan-pendekatan seperti penggunaan studi kasus hukum yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, diskusi tentang hak dan kewajiban hukum, serta pengembangan keterampilan pemecahan masalah hukum telah terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman hukum.

3. Persepsi dan Dampak pada Siswa dan Pendidik: Hasil dari wawancara dan kuesioner menunjukkan bahwa baik siswa maupun pendidik memiliki persepsi positif terhadap penerapan psikologi hukum dalam pendidikan. Siswa melaporkan peningkatan pemahaman mereka tentang hak dan kewajiban hukum, sementara pendidik melaporkan peningkatan dalam keterlibatan siswa dan minat mereka terhadap pembelajaran hukum.
4. Tantangan dan Implikasi Praktis: Meskipun terdapat manfaat yang jelas dari integrasi psikologi hukum dalam pendidikan, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan, seperti kurangnya sumber daya dan pelatihan bagi pendidik, serta perlawanan terhadap perubahan dalam kurikulum. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dengan menyediakan dukungan yang memadai dan pelatihan yang diperlukan bagi pendidik.

Penelitian ini menyoroti pentingnya memahami dan menerapkan konsep psikologi hukum dalam pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan literasi hukum di kalangan pelajar. Integrasi psikologi hukum dalam kurikulum pendidikan dapat memberikan manfaat besar dalam membekali siswa dengan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban hukum mereka dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pendekatan-pendekatan yang melibatkan psikologi hukum dalam pembelajaran dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan minat mereka terhadap pembelajaran hukum (Abicandra, 2021). Meskipun demikian, penelitian ini juga menyoroti beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti kurangnya sumber daya dan pelatihan bagi pendidik. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pendidik, ahli psikologi hukum, dan pembuat kebijakan untuk mengatasi tantangan ini dan mendorong integrasi psikologi hukum dalam pendidikan. Dengan demikian, artikel ini berkontribusi pada pemahaman tentang pentingnya psikologi hukum dalam meningkatkan literasi hukum di kalangan pelajar serta memberikan panduan praktis bagi pengembangan kurikulum pendidikan yang lebih efektif. Berikut adalah beberapa poin utama yang ditemukan (Rahmawati, 2019):

1. Pemahaman tentang Literasi Hukum: Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa literasi hukum melibatkan pemahaman tentang hukum, termasuk hak dan kewajiban hukum, serta kemampuan untuk menggunakan pengetahuan ini dalam kehidupan sehari-hari. Literasi hukum bukan hanya tentang pengetahuan tentang hukum, tetapi juga kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan menginterpretasi informasi hukum.

2. Kontribusi Psikologi Hukum: Analisis konseptual mengungkapkan bahwa psikologi hukum memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan literasi hukum siswa melalui pemahaman tentang faktor-faktor psikologis yang memengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku terkait hukum. Misalnya, psikologi hukum dapat membantu dalam memahami mengapa siswa cenderung mematuhi atau melanggar hukum, serta faktor-faktor apa yang memengaruhi keputusan mereka.
3. Penerapan dalam Konteks Pendidikan: Studi kasus dan observasi menunjukkan bahwa penerapan konsep-konsep psikologi hukum dalam pendidikan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum siswa. Pendekatan yang melibatkan studi kasus, permainan peran, dan diskusi reflektif tentang isu-isu hukum aktual dapat membantu siswa untuk menginternalisasi konsep-konsep hukum dan mengembangkan keterampilan analisis kritis mereka.
4. Pandangan Stakeholder: Wawancara dan kuesioner memberikan pandangan yang beragam dari para pendidik, siswa, dan pakar psikologi hukum. Sebagian besar responden menyatakan bahwa integrasi psikologi hukum dalam pendidikan memiliki manfaat signifikan dalam meningkatkan literasi hukum siswa. Mereka mengakui bahwa pendekatan ini membantu siswa untuk lebih memahami relevansi hukum dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Temuan dari kajian ini menyoroti pentingnya integrasi psikologi hukum dalam pendidikan sebagai sarana untuk meningkatkan literasi hukum di kalangan pelajar. Dengan memahami faktor-faktor psikologis yang memengaruhi persepsi dan perilaku terkait hukum, pendidik dapat mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih efektif untuk membantu siswa memahami dan menginternalisasi konsep-konsep hukum (Iskandar et al., 2024). Penerapan konsep-konsep psikologi hukum dalam pendidikan, seperti melalui studi kasus, permainan peran, dan diskusi reflektif, telah terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman hukum siswa. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang melibatkan interaksi aktif dan refleksi tentang masalah hukum aktual dapat membantu siswa untuk mengaitkan pengetahuan hukum dengan pengalaman mereka sendiri. Meskipun demikian, perlu diakui bahwa masih ada tantangan dalam menerapkan pendekatan psikologi hukum dalam pendidikan secara menyeluruh (Agama & Sastra, 2023). Diperlukan dukungan dari pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, untuk mengintegrasikan psikologi hukum

dalam kurikulum pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, hasil kajian ini memberikan kontribusi yang berharga bagi pemahaman tentang bagaimana psikologi hukum dapat digunakan untuk meningkatkan literasi hukum di kalangan pelajar. Implikasi praktis dari penelitian ini dapat membantu dalam merancang program pendidikan yang lebih efektif dalam membekali siswa dengan pemahaman yang memadai tentang hukum dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam konteks ini, penting bagi lembaga pendidikan dan pemerintah untuk mempertimbangkan integrasi konsep psikologi hukum dalam pengembangan kurikulum pendidikan formal. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan pelatihan bagi pendidik tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip psikologi hukum dalam pembelajaran kelas. Selain itu, pengembangan materi pembelajaran yang menekankan aspek-aspek psikologis dari hukum juga dapat menjadi langkah yang efektif.

Selanjutnya, penelitian lanjutan dapat menggali lebih dalam tentang metode-metode spesifik dalam penerapan psikologi hukum dalam pendidikan, serta mengukur dampaknya secara langsung terhadap literasi hukum siswa. Selain itu, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam menerapkan pendekatan ini juga akan membantu dalam merancang strategi yang lebih efektif. Tidak hanya itu, kerjasama antara lembaga pendidikan, ahli psikologi hukum, dan komunitas juga perlu ditingkatkan untuk mengintegrasikan perspektif hukum dalam berbagai aspek kehidupan siswa di luar lingkungan sekolah. Inisiatif seperti seminar, lokakarya, dan program pengembangan komunitas dapat membantu dalam memperluas cakupan literasi hukum di masyarakat secara keseluruhan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan bahwa integrasi psikologi hukum dalam pendidikan akan menjadi lebih terstruktur dan berkelanjutan, serta dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum dan berperilaku secara bertanggung jawab dalam kehidupan mereka sehari-hari (Aulia et al., 2024). Selain itu, perlu juga untuk mengembangkan evaluasi yang tepat guna dalam menilai efektivitas integrasi psikologi hukum dalam pendidikan. Pengukuran tingkat literasi hukum sebelum dan sesudah penerapan pendekatan psikologi hukum dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampaknya terhadap pemahaman dan kesadaran hukum siswa. Langkah-langkah ini tidak hanya akan meningkatkan literasi hukum di kalangan pelajar, tetapi juga dapat membantu dalam meminimalkan konflik hukum dan melahirkan masyarakat yang lebih sadar hukum secara keseluruhan. Kesadaran hukum yang lebih baik dapat membawa dampak positif dalam

berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti mengurangi pelanggaran hukum, meningkatkan partisipasi dalam proses hukum, dan memperkuat prinsip-prinsip keadilan (M. Suud, 2017). Sebagai penutup, penelitian ini menegaskan bahwa psikologi hukum memiliki peran yang krusial dalam meningkatkan literasi hukum di kalangan pelajar melalui pendidikan. Dengan menerapkan konsep-konsep psikologi hukum dalam pembelajaran, masyarakat dapat diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hukum dan lebih mampu mengambil keputusan yang berbasis pada pengetahuan hukum. Langkah-langkah konkret seperti pelatihan pendidik, pengembangan kurikulum yang berbasis psikologi hukum, serta evaluasi yang terus-menerus, sangat diperlukan untuk mencapai tujuan ini.

KESIMPULAN

Kajian literasi hukum dalam pendidikan dengan pendekatan psikologi hukum mengungkapkan potensi besar dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan pelajar. Dalam konteks ini, psikologi hukum menawarkan wawasan yang berharga tentang interaksi antara hukum dan perilaku manusia, serta bagaimana pengetahuan tentang hukum dapat memengaruhi sikap dan tindakan individu. Temuan dari kajian ini menunjukkan bahwa integrasi konsep-konsep psikologi hukum dalam pendidikan dapat memperkuat literasi hukum siswa dengan memahami faktor-faktor psikologis yang memengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku terkait hukum. Pendekatan yang melibatkan studi kasus, permainan peran, dan diskusi reflektif membuktikan efektif dalam membantu siswa menginternalisasi konsep-konsep hukum dan mengembangkan keterampilan analisis kritis mereka. Meskipun demikian, penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya dukungan dan kolaborasi antara lembaga pendidikan, pemerintah, ahli psikologi hukum, dan komunitas untuk mengintegrasikan psikologi hukum dalam kurikulum pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan. Evaluasi yang tepat dan terus-menerus juga diperlukan untuk mengukur dampak penerapan psikologi hukum dalam meningkatkan literasi hukum siswa. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan bahwa integrasi psikologi hukum dalam pendidikan akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum, berperilaku secara bertanggung jawab, dan menghormati prinsip-prinsip keadilan. Oleh karena itu, upaya ini tidak hanya akan membantu memperkuat fondasi literasi hukum di kalangan pelajar, tetapi juga dapat membawa dampak positif yang luas dalam pembangunan sosial dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- A'isyah, S. (2022). Buruh Tani dalam Hukum Positif: Sebuah Kajian Perundangan untuk Upaya Gagasan Perlindungan. *Maqashid: Jurnal Hukum Islam*, 5(1), 29–37.
- Abicandra, M. N. H. (2021). Muhammad Nidom Hamami Abicandra e-issn. *Jurnal Pendekatan Dan Kajian Aswaja*, 7(1), 21–30.
- Agama, J. P., & Sastra, B. D. A. N. (2023). *EMPAT BERSAUDARA DALAM UTTARAKĀṆḌ A : SEBUAH KAJIAN. XIII*(1), 31–41.
- Aulia, G., Saragih, Y. M., & Zarzani, T. R. (2024). Pekerja Anak dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Syariah: Sebuah Kajian Komparatif. *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2), 1598–1607. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3958>
- Iskandar, M. F., Dewi, D. A., & Hayat, R. S. (2024). Pentingnya Literasi Budaya Dalam Pendidikan Anak Sd: Sebuah Kajian Literatur. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5(1), 785–794.
- Kartini, A., Asmaniah, Z., & Julianti, E. (2022). Pendidikan Literasi Finansial: Dampak Dan Manfaat (Sebuah Kajian Literatur Review). *Kode : Jurnal Bahasa*, 11(3). <https://doi.org/10.24114/kjb.v11i3.38814>
- M. Suud, F. (2017). Amsal al-Qur'an: Sebuah Kajian dalam Psikologi Pendidikan Islam. *Fikrotuna*, 5(1). <https://doi.org/10.32806/jf.v5i1.2952>
- Murdoko, M. (2020). Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Judicial Review (Sebuah Pendekatan Sosiologis). *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 3(1), 86–99. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.89>
- Rahmawati, A. (2019). Nilai Budaya Dan Psikologi Dalam Cerpen Rumah Batu Kakek Songkok. *LITERASI: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia Dan Daerah*, 9(1), 1–13. <https://doi.org/10.23969/literasi.v9i1.1695>
- Sari, R. K. (2017). Representasi Perempuan Dalam Pertunjukan “Demi Masa”: Sebuah Kajian Tari Karya Alfiyanto. *Jurnal Pendidikan Dan Kajian Seni*, 2(2), 165–182. <https://doi.org/10.30870/jpks.v2i2.2530>